

***Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan***

Muhammad Afriaji  
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAG Surabaya

**ABSTRACT**

*The Smart Indonesia Program Policy (PIP) is a program that aims to help poor students get a proper education, prevent children from dropping out of school and to meet their school needs such as transportation costs to school, school supplies, pocket money as well as training or course fees. The purpose of this study was to determine the evaluation of PIP in high school in Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency and to determine the inhibiting factors in its implementation.*

*The research was carried out at SMKN 1 Amuntai and SMAN 1 Amuntai, Central Amuntai District. This study uses a qualitative approach. The data uses primary data, secondary data and tertiary data. The number of informants in this study amounted to 11 people. Methods of data collection by observation, interviews and documentation. The analysis technique uses data reduction, data presentation and drawing conclusions. The evaluation model used is the CIPP evaluation model (Context, Input, Process and Product).*

*The results showed that there was no PIP team that was specifically formed by the education unit, the accuracy of the targeting of PIP recipients was considered to be still not correct because the DTKS data that became the data for determining students who deserved to get PIP was not yet accurate so that additional, more structured selection was needed such as verifying the condition of students. actually in the field. Supervision is still weak on the use of PIP assistance funds by students, so efforts are needed from the school and parents to cooperate in supervision. The impact of PIP in high school has not really led to access to PIP for Higher Education, therefore there is a need for socialization and motivation for students to continue their education to college with the scholarship.*

**Keywords:** *evaluation, policy, PIP*

---

**PENDAHULUAN**

Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu program pemerintah pencegah akan terjadinya siswa yang putus sekolah, semakin banyak PIP ini disalurkan ke setiap siswa yang kurang mampu maka akan semakin banyak juga kemungkinan mereka untuk tetap melanjutkan sekolah. Namun program-program bantuan seperti ini tentunya harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat, karena bantuan ini tidak boleh salah sasaran

---

Berdasarkan observasi sementara bahwa ditemukannya beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat SLTA pada sekolah yang berada di Kecamatan Amuntai Tengah seperti kurang idealnya proses seleksi atau pemilihan siswa yang akan mendapatkan PIP, kemudian dinilai belum tepat sasaran, karena masih ada siswa yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan dari PIP serta adanya penerima yang memiliki latar belakang ekonomi yang mampu yang mendapatkan PIP. Selain itu kurangnya pemahaman siswa dan orang tua siswa dalam penggunaan dana PIP itu, sehingga penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan tujuan PIP yaitu untuk keperluan sekolah bukan untuk kepentingan lain diluar keperluan sekolah.

Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis tertarik mengadakan penelitian tentang **“Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan”**.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2015:2) adalah “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public to do or not do*)”. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping masalah publik. Definisi kebijakan publik menurut Thomas Dye mengandung makna bahwa:

1. Kebijakan publik tersebut di buat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah

### **Evaluasi Kebijakan**

Konsep evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process and Product*) pertama kali dikenalkan oleh Stufflebeam pada 1965 sebagai usahanya mengevaluasi ESEA (*the Elementary and Secondary Act*). Menurut Madaus, Scriven, Stufflebeam yang dikutip oleh Darodjat dan Wahyudhiana (2015:5), tujuan penting model ini adalah untuk memperbaiki, dikatakan bahwa: “pendekatan CIPP didasarkan pada pandangan bahwa tujuan evaluasi yang paling penting bukanlah untuk membuktikan tetapi untuk meningkatkan”.

Evaluasi model Stufflebeam terdiri dari empat dimensi, yaitu: 1) *context*, 2) *input*, 3) *process*, dan 4) *product*, sehingga model evaluasinya diberi nama CIPP. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yaitu komponen dan proses sebuah program kegiatan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Amuntai dan SMAN 1 Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provisini Kalimantan Selatan Kode Pos 71418.

## **Obyek dan Informan Penelitian**

### 1. Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang berkepentingan atau orang yang bersangkutan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data pendukung yang digunakan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Adapun data-data sekunder yang penulis kumpulkan di sini diantaranya adalah buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang terkait.

#### c. Data Tersier

Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam Tesis ini.

### 2. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2015) informan adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan atau terlibat langsung dalam permasalahan sehingga peneliti dapat merangkum informasi yang penting dalam focus penelitian. Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil yang representative, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 11 orang.

## **Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian (Sugiyono, 2015:204) adalah:

1. Observasi.
2. Wawancara
3. Dokumentasi

### **Teknik Analisa Data**

Menurut Matthew B. Milles dan Michael Huberman yang dikutip Sugiyono (2015:207) menyatakan bahwa aktivitas dalam model analisis data kualitatif mencakup 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan**

Penelitian ini difokuskan pada menganalisis evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada SLTA di Kecamatan Amuntai Tengah menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, & Product*) oleh Stufflebeam yang dikutip oleh Darodjat dan Wahyudhiana (2015:5-9).

## 1. *Context* (Konteks)

Dalam dimensi *context* (konteks) peneliti menganalisis tentang mutu PIP, dukungan terhadap PIP dan kerjasama antar pihak terkait PIP.

Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam PIP ini untuk memenuhi mutu yang baik, diantaranya seperti ketepatan sasaran penerima PIP yang dirasa masih belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria penerima PIP yang berhak. Pada program ini diketahui bahwa hasil yang didapat dari PIP ini hanya sebatas peningkatan kuantitas keuangan peserta didik, namun tidak memperhatikan kualitas keuangan peserta didik dalam menempuh pendidikannya, seharusnya adanya pengarahan dan pengawasan oleh pihak berwenang seperti dinas pendidikan dan pihak sekolah untuk berkomitmen membantu peserta didik dalam mengelola dana bantuan tersebut sehingga tujuan PIP ini terlaksana dengan maksimal.

Disamping itu, peneliti juga menemui bahwa rata-rata peserta didik tidak mengetahui tentang adanya beasiswa KIP Kuliah yang diperuntukkan untuk siswa / calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan merupakan bantuan pendidikan lanjutan dari PIP ini. Seharusnya pihak sekolah memiliki inisiatif tersendiri untuk mensosialisasikan dan memotivasi siswa penerima PIP untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi tanpa mengkhawatirkan biaya pendidikan karena pemerintah juga menyediakan bantuan pendidikan berupa beasiswa KIP Kuliah.

## 2. *Input* (Masukan)

Pada dimensi *input* (masukan) peneliti menganalisis tentang SDM dalam PIP, dana bantuan PIP, sarana dan prasarana penunjang PIP dan pedoman/peraturan PIP.

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) pada halaman 5, Bab I Pelaksana Program huruf D yang mengatur tentang Pelaksana PIP Dikdasmen Tingkat Satuan Pendidikan menjelaskan bahwa harus adanya pembentukan Tim PIP itu sendiri di setiap satuan pendidikan / sekolah agar tugas dan kewenangannya masing-masing lebih terarah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya di lapangan peneliti tidak menemukan adanya tim khusus PIP sesuai dengan peraturan di atas yang harusnya di tetapkan oleh kepada satuan pendidikan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dapat diketahui bahwa besaran dana bantuan PIP yang diterima oleh peserta didik tingkat SLTA adalah Rp. 500.000,- per semester atau Rp. 1.000.000,- per tahun. Jika dihitung perbulan artinya peserta didik mendapatkan Rp. 83.333.-, tentu hal ini tidak sepadan dengan pengeluaran siswa yang lumayan banyak, seperti uang makan di sekolah, pembelian buku pelajaran, uang transportasi ke sekolah dan hal lainnya. Beruntunglah siswa yang orang tuanya memberikan uang saku yang cukup, bagaimana jika ada orang tua siswa yang tidak mampu memberikan uang saku, tentu hal ini menjadi kesulitan siswa dalam memenuhi

kebutuhannya terutama dalam hal keperluan sekolah yang dinilai lumayan banyak.

### 3. *Process* (Proses)

Dimensi *process* (Proses) menganalisis tentang proses pendaftaran dan seleksi calon penerima PIP, ketepatan sasaran PIP, penyaluran dana PIP, ketepatan penggunaan dana bantuan PIP dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan PIP.

Proses pendaftaran dan seleksi penerima PIP pada SLTA di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai yaitu SMKN 1 Amuntai dan SMAN 1 Amuntai, dapat diketahui bahwa setiap sekolah memiliki alur pendaftaran yang sama yaitu dimulai dari penyaringan peserta didik baru mendaftar yang mengumpulkan data dan kartu bantuan sosial seperti KKS, PKH serta SKTM yang memang itu dimiliki oleh keluarga dari peserta didik tersebut. Setelah data dan berkas tercukupi untuk diajukan. Namun seharusnya pihak sekolah melaksanakan penyaringan dan seleksi kembali dalam menentukan siswa penerima PIP di masing-masing sekolah. Baik itu seleksi wawancara maupun verifikasi atau survey langsung ke rumah siswa yang bersangkutan, apakah status kesejahteraan sosial yang tertera di berkas-berkas yang diajukan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Verifikasi dan validasi ke lapangan (ke rumah peserta didik) dinilai menjadi sebuah unsur penting untuk dilaksanakan dalam menentukan penerima PIP agar lebih tepat sasaran. Karena bukan tidak mungkin siswa atau keluarga siswa memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan pihak terkait dalam penentuan status kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga timbulnya kolusi antar masyarakat dengan aparat.

Penggunaan dana bantuan PIP oleh peserta didik penerima PIP secara umum sudah tepat seperti digunakan untuk uang saku sekolah, pembelian buku pelajaran, pakaian sekolah serta keperluan sekolah lainnya. Namun disisi lain, sebagian siswa penerima PIP masih belum mengerti tentang penggunaan dana bantuan PIP diperuntukkan untuk keperluan apa saja yang diperbolehkan, ketidakpahaman ini ditambah adanya kesulitan ekonomi, sehingga siswa penerima PIP terkadang menggunakannya untuk membantu pengeluaran sehari-hari keluarga atau orang tuanya.

### 4. *Product* (Produk)

Dalam dimensi *Product* (produk) peneliti menganalisis tentang pencapaian tujuan PIP dan dampak PIP kepada penerima manfaat.

Pencapaian tujuan PIP pada SLTA di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan PIP sepenuhnya belum tercapai hal ini terbukti pernyataan pihak sekolah yang mengatakan hanya 70-80 persen tujuan PIP yang tercapai yaitu membantu siswa miskin atau siswa dari keluarga yang rentan miskin untuk melanjutkan pendidikannya tanpa terkendala biaya. Dapat dikatakan bahwa hal yang paling berpengaruh terhadap pencapaian tujuan PIP adalah penyaringan atau penentuan status masyarakat itu miskin atau masih tergolong mampu, hal ini tentu

memengaruhi proses pengajuan siswa yang miskin berdasarkan data dan kartu sosial yang dimilikinya.

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah halaman 2 huruf A tentang Tujuan PIP Dikdasmen menjelaskan bahwa tujuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) adalah meningkatkan akses pendidikan, mencegah peserta didik putus sekolah akibat kesulitan ekonomi serta menarik peserta didik yang telah putus sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan kembali.

Dampak PIP selama ini masih bersifat manfaat jangka pendek, dimana hanya memfokuskan bantuan pada saat sekolah SLTA. Padahal kelanjutan dari PIP sekolah ini ada program PIP Perguruan Tinggi atau sering dikenal KIP Kuliah (dulu BIDIKMISI). Kebanyakan dari peserta didik yang mendapatkan PIP di SLTA tidak mengetahui program KIP Kuliah ini. Seharusnya dari pihak sekolah lebih gencar lagi mensosialisasikan program KIP Kuliah ini kepada peserta didik yang menerima PIP atau yang tidak menerima. Tentu hal ini akan memengaruhi semangat peserta didik untuk tetap melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang perguruan tinggi tanpa terkendala oleh biaya kuliah.

## **Faktor Penghambat Program Indonesia Pintar (PIP) pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan**

### **1. Kurangnya Kouta Penerima PIP**

Seringkali di dalam program bantuan sosial dan pendidikan, salah satunya dalam PIP ini, perihal jumlah atau kouta yang diberikan menjadi sebuah kendala dalam menerapkan program tersebut. Contohnya saja, jika ada 50 peserta didik yang harusnya mendapatkan PIP jika dilihat dari kemampuan ekonomi keluarganya, namun dikarenakan pembagian kouta di sekolah tersebut hanya untuk 15 peserta didik, hal ini berarti ada 35 peserta didik yang tidak mendapatkan PIP tersebut. Pihak sekolah sangat tidak memungkinkan untuk mengajukan tambahan kouta lagi ke pemerintah pusat atau provinsi, sehingga harus memaksimalkan kouta yang ada. Tentu hal ini akan berdampak buruk dalam pencapaian tujuan PIP itu sendiri, dimana PIP bertujuan untuk membantu peserta didik yang berstatus sosial miskin atau rentan miskin. Bukan tidak mungkin siswa yang tidak mendapatkan PIP tadi akan memengaruhi motivasi bersekolahnya karena mengalami kendala di ekonomi dan yang parah lagi jika siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah.

Hal diatas sejalan dengan pernyataan dari Bapak Drs. H. Ahdiat Gazali, SH., MH selaku Kepala SMAN 1 Amuntai, beliau menyatakan bahwa:

*“Saya lebih menyoroti mutu ini ke pembagian kouta tiap sekolah yang relatif masih sedikit jika dibandingkan jumlah siswa yang memang harusnya dibantu pemerintah. Contohnya terkadang ada siswa atau orang tua yang*

*datang kesekolah meminta bantuan PIP ini, sedangkan kouta kita hanya sedikit dan itu pun sudah yang mengisi, jadi pihak sekolah tidak mampu apa-apa untuk mengajukan siswa tersebut.”* (Berdasarkan hasil wawancara, 11 Mei 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kekurangan kouta dalam pelaksanaan PIP di sekolah tentu akan menjadi sebuah kendala. Sedangkan pihak sekolah hanya berupaya memenuhi kouta tersebut dengan semaksimal mungkin walaupun memang tidak bisa dipungkiri selalu ada harapan untuk adanya penambahan kouta dari pemerintah.

## **2. Data Kesejahteraan Sosial yang Belum Akurat**

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada halaman 1 – 2, Bab I Pendahuluan huruf B tentang penerima PIP Dikdasmen (pendidikan dasar dan pendidikan menengah) angka 1 huruf a menjelaskan bahwa penerima PIP adalah anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin / rentan miskin yang tercatat di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dari Kementerian Pendidikan dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kementerian Sosial. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa data kesejahteraan sosial keluarga dari peserta didik merupakan kriteria utama dalam mendapatkan PIP. Tentu DTKS ini haruslah berisi data ter-akurat dan ter-update karena pasti akan memengaruhi pengajuan PIP di setiap sekolah.

Dikutip [Bisnis.com](https://bisnis.com) (tanggal artikel 11/05/2020) oleh Muhammad Wildan, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019 yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) masih kurang akurat bila dijadikan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (bansos). BPK RI mencatat pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS masih belum memadai untuk menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bansos. Hal ini pun berlaku kepada Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadikan DTKS sebagai dasar penentuan penerima PIP.

## **3. Tidak Dibentuknya Tim PIP di Sekolah**

Setiap penyelenggaraan kegiatan tentu memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penggerak utamanya, karena tidak akan mungkin berhasil sebuah kegiatan tanpa adanya manusia melakukan proses kegiatan tersebut. Hal ini berlaku juga terhadap kebijakan atau program pemerintah yang dimana ada tahapan perencanaan, implementasinya sampai dengan pengawasan sekalipun, SDM selalu menjadi hal utama yang harus diperhatikan, karena SDM adalah kunci dari semua tahapan tadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fikri, S.Sos selaku Operator Dapodik SMAN 1 Amuntai, beliau menyatakan bahwa:

*“SDM untuk pengelolaan PIP ini sangat terbatas pak. Sedangkan kami memiliki pekerjaan lain yang harus dikerjakan selain ini. Jadi tidak ada tim yang memang mengurus ini ataupun dibentuknya panitianya”* (Berdasarkan hasil wawancara, 11 Mei 2022)

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Rudiannor, S.Sos selaku Operator Dapodik SMKN 1 Amuntai, beliau menyatakan bahwa:

*“Untuk mengurus PIP ini saya sendiri pak sebagai Operator Dapodik, seperti mengupload data-datanya. Kalau untuk menyampaikan informasi-informasi terkait biasanya juga meminta bantuan ke wali kelas”* (Berdasarkan hasil wawancara, 10 Mei 2022)

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa SMKN 1 Amuntai dan SMAN 1 Amuntai tidak membentuk Tim PIP yang secara khusus mengurus dan mengelola pelaksanaan PIP di sekolahnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan tugas dan fungsi setiap pegawai tidak terstruktur dan sistematis di dalam pelaksanaan PIP. Seharusnya kepala satuan pendidikan membentuk tim khusus yang memang tim disahkan secara hukum di dalam SK (Surat Keputusan) Tim Pengelola PIP sehingga setiap pegawai yang terkait dalam PIP ini merasa lebih jelas terhadap tugasnya.

## **KESIMPULAN**

### **Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan**

#### **1. Context (Konteks)**

Mutu PIP perlu adanya evaluasi dalam hal kepastian waktu pencairan dana bantuan, mutu data kesejahteraan sosial harus lebih akurat lagi, dampak / manfaat program kepada penerima manfaat yang lebih luas lagi. Kemudian dukungan terhadap PIP, perlu adanya dukungan dari orang tua dalam melakukan pengawasan penggunaan dana bantuan. Pada indikator kerjasama yang harus lebih erat lagi dengan pihak terkait.

#### **2. Input (Masukan)**

Perlu dibentuknya tim pengelola PIP yang sesuai dengan perundang-undangan PIP, besaran dana bantuan yang dirasa relatif rendah jika dibandingkan keperluan peserta didik penerima PIP dan untuk sarana prasarana penunjang dinilai sudah baik. Kemudian pihak terkait belum terlalu mengetahui dan paham mengenai peraturan atau perundang-undangan tentang PIP dan petunjuk pelaksanaannya. Seharusnya kementerian yang terkait dalam PIP ini yaitu Kemdikbud dan Kemensos gencar melakukan sosialisasi hal ini

#### **3. Process (Proses)**

Diharapkan pada proses awal pengajuan penerima PIP, sebelumnya dilakukan seleksi yang memang terstruktur seperti adanya wawancara dan verifikasi langsung ke rumah calon penerima. Tentu seleksi yang baik akan memengaruhi ketepatan sasaran penerima PIP, namun untuk sekarang pada SLTA di Kecamatan Amuntai Tengah dinilai ketepatan sasaran penerima PIP masih belum sepenuhnya tepat. Kemudian untuk penyaluran dana bantuan PIP dinilai sudah baik yang dimana dana bantuan langsung masuk ke rekening bank yang dimiliki setiap siswa penerima PIP. Selain itu, untuk ketepatan



penggunaan dana bantuan PIP agar lebih tepat lagi, karena ada masih permasalahan dimana orang tua menggunakan dana bantuan PIP yang memang diperuntukkan dalam hal keperluan pendidikan peserta didik tersebut. Untuk pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan PIP oleh siswa memang tidak ada diatur di dalam peraturan / petunjuk pelaksanaan PIP sehingga hal ini dirasa tidak perlu dievaluasi.

4. *Product* (Produk)

Pihak sekolah telah mengusahakan pencapaian tujuan PIP dengan berbagai upaya dalam rangka membantu siswa miskin/rentan miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian untuk dampak PIP terhadap penerima manfaat dalam hal ini yaitu peserta didik/siswa agar lebih diperhatikan lagi, seperti dampak yang memang bersifat jangka panjang salah satunya akses ke PIP Perguruan Tinggi.

**Faktor Penghambat Program Indonesia Pintar (PIP) pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan**

1. Kurangnya kouta penerima PIP

Hal ini menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) pada SLTA di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai sebab akan memengaruhi pencapaian tujuan PIP itu sendiri, jika kouta yang tersedia lebih banyak tentu akan memberikan kesempatan akses pendidikan yang lebih luas untuk siswa dari keluarga miskin/rentan miskin, sebaliknya jika kouta relatif sedikit tentu hal ini akan mempersempit kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena terkendala oleh biaya.

2. Data kesejahteraan sosial yang belum akurat

Ketepatan sasaran penerima PIP pasti dipengaruhi oleh keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterbitkan oleh Kemensos. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan keakuratan DTKS, tidak ada kolusi antar masyarakat dan aparat terkait penentuan DTKS, memperhatikan selalu dinamika tingkat kesejahteraan sebuah keluarga yang mana selalu berubah-ubah seiring waktu.

3. Tidak dibentuknya tim PIP di sekolah

Pada SMKN 1 Amuntai dan SMAN 1 Amuntai sebagai lokasi penelitian dapat diketahui belum dibentuknya tim pengelola yang secara khusus mengelola PIP di setiap satuan pendidikan/sekolah, padahal Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, mengamanatkan perlu dibentuknya Tim PIP di setiap satuan pendidikan yang mendapatkan kouta PIP.

**SARAN**

1. *Context* (konteks)

- a. Pihak kementerian pendidikan maupun dinas pendidikan senantiasa memberikan arahan yang berkesinambungan ke satuan pendidikan yang melaksanakan PIP serta selalu melakukan mengevaluasi kinerja satuan pendidikan / sekolah dalam pelaksanaan PIP
  - b. Kementerian sosial maupun dinas sosial setempat selalu memperbaharui DTKS secara berkelanjutan demi menyesuaikan kondisi masyarakat yang status kesejahteraannya bersifat dinamis atau berubah-ubah, sehingga mutu DTKS lebih akurat dalam ketepatan penerima PIP
2. *Input* (masukan)
- a. Perlu dibentuknya tim khusus PIP di setiap sekolah yang melaksanakan PIP dengan dibuktikan SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh kepala Satuan Pendidikan
  - b. Diharapkan Kementerian Pendidikan maupun Dinas Pendidikan setempat selalu menyelenggarakan pelatihan dalam peningkatan kemampuan dan pengetahuan tentang pelaksanaan PIP kepada pengelola PIP di satuan pendidikan
  - c. Diharapkan adanya peningkatan besaran bantuan PIP yang didapatkan siswa agar pencapaian tujuan PIP lebih optimal
  - d. Memperbaharui pedoman / petunjuk teknis atau pelaksanaan PIP Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) setiap tahunnya, seperti halnya pedoman KIP Kuliah yang diperbaharui setiap tahunnya.
3. *Process* (proses)
- a. Pihak satuan pendidikan / sekolah sebagai pelaksana PIP diharapkan melakukan seleksi calon peserta didik penerima PIP yang terstruktur dan sistematis, seperti adanya wawancara dan verifikasi / survey ke rumah peserta didik
  - b. Dinas Sosial setempat melakukan verifikasi ulang DTKS siswa calon penerima PIP yang akan diajukan oleh pihak sekolah
  - c. Pihak satuan pendidikan lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan PIP oleh peserta didik penerima PIP
  - d. Peserta didik / siswa penerima PIP agar lebih cermat lagi dalam penggunaan dana bantuan PIP yang didapatkan agar hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan saja, selain itu peserta didik diharapkan menghemat dana bantuan PIP yang disalurkan ke rekening masing-masing, dikarenakan dana yang didapatkan relatif kecil
  - e. Orang tua melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan PIP yang didapatkan oleh anaknya serta orang tua berkomitmen untuk tidak menggunakan dana bantuan PIP yang didapatkan oleh anaknya untuk keperluan yang bukan keperluan pendidikan
4. *Product* (produk)
- a. Diharapkan dengan adanya PIP ini anak yang rentan untuk berhenti sekolah dikarenakan faktor kendala ekonomi agar dapat terbantu untuk tetap bersekolah
  - b. Pihak terkait PIP seperti Kementerian Pendidikan hingga pihak satuan pendidikan agar dapat meningkatkan minat siswa untuk tetap melanjutkan pendidikannya bahkan sampai ke perguruan tinggi

- c. Agar dampak yang diharapkan dalam PIP ini tidak hanya sebatas memberikan akses pendidikan di tingkat SLTA saja, maka dipandang perlu adanya motivasi kepada siswa untuk tetap melanjutkan kuliah setelah lulus SLTA
- d. Pihak sekolah serta dinas pendidikan setempat agar lebih gencar menyediakan dan membantu siswa penerima PIP untuk mendapatkan informasi tentang program beasiswa perguruan tinggi salah satu adalah Beasiswa KIP Kuliah

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, Dina. (2021). *Evaluasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar dalam Mencegah Peserta Didik dari Kemungkinan Putus Sekolah di SD IT Nurul Iman Palembang*. Undergraduate Thesis thesis. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Damayanti, Rika. (2020). *Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2019 pada MTsN 1 Tabalong*. Skripsi. STIA Amuntai
- Darodjat & Wahyudhiana M. (2015). *Model Evaluasi Program*. Islamadina, Vol. XIV, No. 1, Maret 2015: 1-28. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Dwiyanto, Agus. (2014). *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hayati, Nurhasana. Sari, Eka Yuliana. (2019). *Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Sembawa*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 3 Mei 2019
- Islamy, Irfan. (2011). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara. Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Abata Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang *Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Program Indonesia Pintar (PIP)*. Diambil dari: <http://www.indonesiapintar.kemdikbud.go.id>
- Mahmudi, Ihwan. (2011). *CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan*. Vol. 6, No. 1, Juni 2011. Universitas Negeri Jakarta
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant. (2016). *Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Edisi Kelima*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Rijal, Muhammad Khairul. Fathurrahman. Pranajaya, Syatria Adymas. (2018). *Evaluasi Program Indonesia Pintar di Madrasah Kota Balikpapan*. Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan & Pembelajaran. Vol. 5, No. 3, November 2018. IAIN Samarinda

- Rizky, Muhammad. (2021). *Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 11 Kota Jambi*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Sari, Ratih Permata. Ahmad. (2020). *Evaluasi Program Indonesia Pintar Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kecamatan Blimbing Kota Malang Dengan Model CIPPO*. Jurnal Evaluasi dan Pembelajaran, Vol. 2, No. 1 Tahun 2020. Universitas Gajayana Malang
- Sari, Winda Nobrilian. (2019). *Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Skripsi. Universitas Sriwijaya
- Septiandika, Verto. (2017). *Evaluasi Implementasi Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Bagi Siswa Kurang Mampu (Studi pada SDN Jrebeng Wetan Tahun 2016)*. ISSN 2354-6948. Universitas Panca Marga Probolinggo.
- Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta:Pustaka Belajar
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Uriyalita, Fitroh. Syahrodi, Jamali. Sumantai. 2020. *Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Telaah tentang Aksesibilitas, Pencegahan dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Wilayah Urban Fringe Harjamukti, Cirebon*. Edum Journal, Vol. 3, No. 2, September 2020. IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Budi. (2016). *Evaluasi Pemanfaatan Program Indonesia Pintar di SMK Cokroaminoto Pandak*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing)
- Yusup, Wirastiani Binti. Ismanto, Bambang. Wasitohadi. (2019). *Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama*. Jurnal Kelola, Vol. 6. No. 1, Januari-Juni 2019. Universitas Kristen Satya Wacana